



GAYA KEPEMIMPINAN OTOKRATIS VS DEMOKRATIS STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ulvia Fadilah¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang Serang Banten
Email: ulvia.fadilah@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan antara gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis dalam pengambilan kebijakan publik pada pemerintah daerah. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Gaya kepemimpinan otokratis ditandai dengan sentralisasi kekuasaan, di mana pemimpin memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan partisipasi bawahan atau masyarakat. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis memberikan ruang bagi kolaborasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan staf pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi kasus ini berfokus pada pemerintah daerah yang menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai pemerintah daerah, analisis dokumen kebijakan, serta survei terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan otokratis cenderung menghasilkan kebijakan yang cepat, namun seringkali kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sedangkan kepemimpinan demokratis memperlambat proses pengambilan keputusan, namun menghasilkan kebijakan yang lebih diterima dan mendukung partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Otokratis, Kepemimpinan Demokratis

ABSTRACT

This research discusses the comparison between autocratic and democratic leadership styles in public policy making in local governments. Leadership style has a significant influence on the quality and effectiveness of the policies produced, as well as public participation in the policy process. Autocratic leadership style is characterized by centralization of power, where the leader has full control in decision-making without involving the participation of subordinates or the community. In contrast, democratic leadership provides room for collaboration and input from various parties, including the community and government staff, so that the resulting policies are more inclusive and responsive to community needs. This case study focuses on a local government that applies both leadership styles in the context of public policy making. Data were collected through interviews with local government employees, analysis of policy documents, and surveys of the community. The results show that autocratic leadership tends to produce policies quickly, but often lacks consideration of community needs, while democratic leadership slows down the decision-making process, but produces policies that are more acceptable and supportive of community participation.

Keywords: Leadership Style, Autocratic Leadership, Democratic Leadership

PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, khususnya di tingkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung atas kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat memengaruhi kualitas, efektivitas, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dua gaya kepemimpinan yang sering dijumpai dalam konteks pemerintahan adalah gaya kepemimpinan

otokratis dan demokratis. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda, serta dapat memengaruhi bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan. Gaya kepemimpinan otokratis ditandai dengan pengambilan keputusan yang tersentralisasi pada pemimpin, dengan sedikit atau tanpa keterlibatan bawahan atau pihak luar, termasuk masyarakat. Pendekatan ini sering dianggap efisien dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, namun dapat memicu resistensi dan kurangnya partisipasi publik. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis lebih mengutamakan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keterlibatan masyarakat. Gaya ini sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik, namun prosesnya cenderung lebih lambat dan kompleks. Pada pemerintah daerah, penerapan kedua gaya kepemimpinan ini dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kualitas kebijakan publik. Di satu sisi, gaya kepemimpinan otokratis memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam menghadapi isu-isu mendesak. Di sisi lain, gaya kepemimpinan demokratis berpotensi memperkuat keterlibatan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penting untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing gaya kepemimpinan dalam konteks pemerintah daerah guna mencapai keseimbangan antara efektivitas dan partisipasi dalam proses kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis terhadap pengambilan kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah. Melalui studi kasus dan analisis komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam memilih pendekatan kepemimpinan yang tepat agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan merupakan tujuan utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting, karena pemimpin adalah pihak yang menentukan arah kebijakan serta pendekatan yang digunakan dalam setiap keputusan. Namun, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin daerah dapat memengaruhi keberhasilan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Dua gaya kepemimpinan yang paling sering ditemui di pemerintahan adalah kepemimpinan otokratis dan demokratis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap proses kebijakan publik.

Kepemimpinan otokratis biasanya menitikberatkan pada pengambilan keputusan yang sentralistik, di mana pemimpin memiliki kendali penuh dan minim melibatkan partisipasi bawahan maupun masyarakat. Gaya kepemimpinan ini sering kali dianggap efisien dalam menghadapi situasi mendesak karena mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan partisipasi dan masukan dari masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis mengutamakan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat terlibat dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun prosesnya sering kali lebih lambat dan membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks.

Di Indonesia, penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dalam pemerintah daerah sangat penting mengingat keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Sebuah kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berisiko sulit diimplementasikan atau bahkan menimbulkan konflik. Sebaliknya, kebijakan yang dirumuskan melalui partisipasi masyarakat cenderung memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh dari kedua gaya kepemimpinan ini terhadap kualitas dan keberhasilan kebijakan publik.

Latar belakang masalah ini mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai perbandingan pengaruh gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. Dengan memahami perbedaan dampak dari kedua gaya kepemimpinan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif, inklusif, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Teori Gaya Kepemimpinan Gaya kepemimpinan merujuk pada pendekatan atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan mengelola anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh karakteristik individu pemimpin, kebutuhan organisasi, serta situasi dan kondisi lingkungan eksternal. Dua gaya kepemimpinan yang sering dibahas dalam literatur adalah gaya kepemimpinan otokratis dan gaya kepemimpinan demokratis. Setiap gaya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang memengaruhi cara pemimpin berinteraksi dengan bawahannya serta hasil yang dicapai.

Gaya Kepemimpinan Otokratis Gaya kepemimpinan otokratis (autocratic leadership) adalah gaya di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan cenderung tidak melibatkan bawahannya. Pemimpin otokratis memberikan arahan yang spesifik dan menuntut kepatuhan tanpa banyak ruang untuk masukan atau diskusi dari anggota tim. Menurut Lewin, Lippitt, dan White (1939), yang merupakan pionir dalam teori gaya kepemimpinan, gaya otokratis ini dapat menghasilkan efektivitas tinggi dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat atau dalam kondisi krisis.

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Otokratis Sentralisasi kekuasaan pada pemimpin. Pemimpin mengambil keputusan tanpa konsultasi dengan bawahan. Tuntutan untuk kepatuhan penuh terhadap arahan. Komunikasi yang cenderung satu arah dari pemimpin ke bawahan. Kelebihan dan Kelemahan *Kelebihan*: Efisiensi tinggi dalam pengambilan keputusan, cocok untuk situasi darurat, dan sering kali lebih cepat dalam mencapai hasil. *Kelemahan* Minimnya partisipasi dan masukan dari bawahan, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan rendahnya motivasi kerja, serta kurangnya inovasi karena tidak adanya keterlibatan anggota dalam proses keputusan.

Gaya Kepemimpinan Demokratis Gaya kepemimpinan demokratis (democratic leadership) menekankan pada partisipasi aktif dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang demokratis cenderung membuka ruang bagi diskusi, kolaborasi, dan pemberian masukan, baik dari bawahannya maupun dari pihak terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan setiap anggota merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Karakteristik Gaya Kepemimpinan Demokratis Keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus. Pemimpin melibatkan bawahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas. Komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif. Pengambilan keputusan yang berbasis pada kolaborasi. Kelebihan dan Kelemahan *Kelebihan* Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anggota, dan memperkuat rasa kepemilikan. *Kelemahan* Proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, rentan terhadap perbedaan pendapat yang berkepanjangan, serta membutuhkan waktu dan koordinasi yang lebih intensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengaruh gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat

pemerintah daerah. Dengan studi kasus sebagai desain penelitian, metode ini memungkinkan peneliti mendalami karakteristik kedua gaya kepemimpinan tersebut serta dampaknya terhadap proses dan hasil kebijakan publik di lokasi penelitian. Lokasi dan Subjek Penelitian Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki variasi gaya kepemimpinan antara otokratis dan demokratis dalam struktur kepeimpinannya. Subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah daerah, staf administrasi, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Pengambilan data dari berbagai pihak ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai gaya kepemimpinan dan dampaknya pada kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik Wawancara Mendalam Wawancara dilakukan dengan pemimpin daerah, staf pemerintahan, dan masyarakat yang terlibat atau terkena dampak kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan dan pengaruhnya terhadap kebijakan yang dihasilkan. Observasi Partisipatif Peneliti terlibat langsung dalam beberapa kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan proses pengambilan keputusan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan dan bagaimana interaksi antara pemimpin dan bawahannya. menganalisis berbagai dokumen kebijakan publik, notulen rapat, serta laporan kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Dokumentasi ini membantu memberikan data yang lebih objektif mengenai proses dan hasil dari penerapan gaya kepemimpinan tertentu. Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dampak antara gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis dalam konteks pemerintah daerah serta implikasinya bagi kualitas kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan terkait dampak gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis terhadap proses dan hasil pengambilan kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan namun berbeda dalam menentukan kualitas, efektivitas, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Gaya Kepemimpinan Otokratis Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan otokratis menghasilkan kebijakan yang relatif cepat karena proses pengambilan keputusan terpusat pada pemimpin. Para staf pemerintah daerah yang berada

di bawah kepemimpinan otokratis mengungkapkan bahwa mereka menerima arahan yang jelas, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat segera dilakukan. Namun, kurangnya keterlibatan staf dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini mengakibatkan beberapa kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga menimbulkan resistensi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Contohnya, dalam kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, keputusan yang diambil secara otokratis cenderung mengutamakan efisiensi dan kepentingan jangka pendek pemerintah daerah. Meski kebijakan tersebut berhasil diterapkan dengan cepat, beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang memengaruhi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otokratis dapat mempercepat proses kebijakan, tetapi kurang efektif dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan diterima masyarakat.

Gaya Kepemimpinan Demokratis Dalam lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, proses pengambilan keputusan berlangsung lebih lambat namun lebih inklusif. Data dari wawancara menunjukkan bahwa para staf dan masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dihargai pendapatnya dalam proses kebijakan. Melalui diskusi yang terbuka, pemimpin demokratis mendengarkan aspirasi masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Meskipun proses ini memerlukan waktu lebih lama, hasil kebijakan umumnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan publik yang lebih luas.

Sebagai contoh, dalam kebijakan peningkatan infrastruktur daerah, pemimpin demokratis mengadakan pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok kepentingan. Kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, seperti pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat langsung bagi warga. Kebijakan ini mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat, dan pelaksanaannya berjalan lancar karena adanya rasa kepemilikan bersama. Ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan demokratis cenderung menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam jangka panjang karena mendapat dukungan dari masyarakat.

Perbandingan dan Analisis Hasil perbandingan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otokratis dan demokratis masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berimplikasi pada efektivitas kebijakan publik. Gaya kepemimpinan otokratis cocok diterapkan pada situasi

yang memerlukan respons cepat atau kebijakan darurat, namun cenderung kurang efektif dalam isu yang kompleks atau melibatkan banyak kepentingan masyarakat. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis lebih sesuai untuk kebijakan yang membutuhkan partisipasi dan keterlibatan publik, meskipun proses pengambilan keputusannya lebih lama. Faktor Kontekstual yang Berpengaruh Krisis atau Kondisi Mendesak Dalam kondisi krisis, gaya otoritis lebih efektif karena memerlukan tindakan cepat dan tegas. Tingkat Kompleksitas Masalah Pada isu yang kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, gaya demokratis lebih tepat karena mempertimbangkan berbagai perspektif. Keterbukaan Masyarakat Masyarakat yang lebih terbuka terhadap partisipasi cenderung mendukung gaya demokratis, sementara dalam masyarakat yang lebih tradisional, gaya otoritis masih diterima. Implikasi terhadap Kebijakan Publik Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan fleksibilitas dalam memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan konteks kebijakan yang akan diambil. Pada isu-isu strategis dan jangka panjang, gaya demokratis lebih disarankan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, untuk keputusan darurat atau yang membutuhkan tindakan segera, gaya kepemimpinan otoritis dapat menjadi pilihan yang efektif. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan hasil pengambilan kebijakan publik. Kombinasi antara gaya otoritis dan demokratis yang disesuaikan dengan situasi dapat membantu pemerintah daerah menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan otoritis dan demokratis memiliki pengaruh yang berbeda dalam proses dan hasil pengambilan kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. Gaya kepemimpinan otoritis menunjukkan efektivitas dalam kondisi yang membutuhkan respons cepat dan keputusan yang terpusat, seperti dalam situasi krisis atau keadaan darurat. Gaya ini memungkinkan kebijakan diimplementasikan dengan segera karena keputusan diambil secara langsung oleh pemimpin tanpa memerlukan masukan dari bawahan atau masyarakat. Namun, keterbatasan gaya ini adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis memberikan ruang bagi keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk staf pemerintah dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, meskipun prosesnya lebih lambat dan kompleks. Partisipasi yang tinggi dalam pengambilan kebijakan juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat, sehingga mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pada isu-isu strategis yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan dukungan masyarakat, gaya kepemimpinan demokratis lebih disarankan. Sementara itu, gaya kepemimpinan otokratis dapat diterapkan pada situasi yang mendesak atau ketika keputusan cepat sangat dibutuhkan. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan kontekstual, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memastikan kebijakan tersebut diterima dan didukung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah terhadap kinerja guru. *Fikruna*, 4(1), 50-63.
- Bass, B. M., & Stogdill, R. M. (1990). *Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications* (3rd ed.). Free Press.
- Djunaedi, R. N., & Gunawan, L. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, 3(3), 400-408.
- Firmana, A. A. (2018). Analisis Dampak Karakteristik Kepribadian Dan Gaya Kepemimpinan Otokratis Terhadap Kinerja Karyawan Pada Atteenahijab Jombang. *Manajemen Bisnis*, 8(1).
- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. *The Journal of Social Psychology*, 10(2), 271-299.
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Pratama, C. Y. (2012). Pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap kepuasan kerja. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1(2).
- Purwanto, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Otokratis Terhadap Kinerja Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada Industri Makanan Kemasan. *Edumaspul-Jurnal Pendidikan*.
- Rosaliawati, B. N., Mustiningsih, M., & Arifin, I. (2020). Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 61-71.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education.
- Stogdill, R. M. (1974). *Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research*. Free Press.
- Tumbol, C. L., Tewal, B., & Sepang, J. L. (2014). Gaya kepemimpinan otokratis, demokratik dan laissez

- faire terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Utari, S., & Hadi, M. M. (2020). Gaya Kepemimpinan Demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (Studi Kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 994-1002.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson.
- Smith, M. J. (2019). *Research Methods in Public Administration and Public Management*. Routledge.
- Morgan, G. (2006). *Images of Organization* (Updated ed.). Sage Publications.
- Silva, A. (2016). What is leadership? *Journal of Business Studies Quarterly*, 8(1), 1-5.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Wahyuni, S., Sukatin, S., Fadilah, I. N., & Astri, W. (2022). Gaya Kepemimpinan Otoriter (Otokratis) Dalam Manajemen Pendidikan. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 123-130.